



Rudiana¹
 Muhammad Mifzal
 Sumarsono²
 Sahrul Romdoni³
 Joshua Dean Eukharisti
 Prabowo Tompunuh⁴

PERAN FASILITAS INFRASTRUKTUR DALAM Mendukung PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DI KOTA BANDUNG: STUDI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Fokus kajian mencakup kebijakan pemerintah daerah, distribusi fasilitas, tantangan birokrasi, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas seperti Youth Center dan Youth Space memainkan peran penting dalam pembinaan pemuda, namun terdapat kendala dalam anggaran, pemeliharaan, dan koordinasi antar instansi. Studi ini juga mengadopsi konsep Josef Kaho tentang administrasi pemerintahan daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan. Rekomendasi strategis diajukan untuk meningkatkan optimalisasi fasilitas infrastruktur guna mendukung pembangunan pemuda yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Infrastruktur, Pembinaan Pemuda, Kebijakan Daerah, Birokrasi, Administrasi Pemerintahan Lokal

Abstract

This study analyzes the role of infrastructure facilities in supporting youth development programs in Bandung City managed by the Youth and Sports Agency (Dispora). The focus of the study includes local government policies, distribution of facilities, bureaucratic challenges, and collaboration between stakeholders. The findings show that facilities such as Youth Center and Youth Space play an important role in youth development, but there are constraints in budget, maintenance, and inter-agency coordination. The study also adopted Josef Kaho's concept of local government administration to evaluate management effectiveness. Strategic recommendations are put forward to improve the optimization of infrastructure facilities to support sustainable youth development.

Keywords: Infrastructure, Youth Development, Local Policy, Bureaucracy, Local Government Administration

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemuda adalah aset strategis dalam pembangunan bangsa, termasuk pada tingkat daerah, karena mereka berperan sebagai motor penggerak perubahan dan penerus kepemimpinan. Namun, potensi ini hanya dapat dimaksimalkan jika terdapat dukungan berupa fasilitas infrastruktur yang memadai. Di Kota Bandung, dengan dinamika kepemudaannya yang tinggi, infrastruktur seperti sarana olahraga, ruang kreatif, dan pusat pelatihan memiliki peran penting dalam mendukung pembinaan pemuda yang produktif dan berdaya saing.

Meskipun Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) telah menyediakan berbagai fasilitas, masih ada tantangan yang menghambat optimalisasi pembinaan pemuda. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan jumlah dan kualitas infrastruktur, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pemuda, hingga perbedaan akses antara wilayah perkotaan

^{1,2,3,4}Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Padjajaran
 email: rudiana@unpad.ac.id¹, muhammad2302@mail.unpad.ac.id², sahrul23001@mail.unpad.ac.id³,
 joshua23001@mail.unpad.ac.id⁴

dan pinggiran. Fasilitas yang tidak terawat atau rusak juga menjadi kendala yang sering dijumpai.

Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam menunjang berbagai program pembinaan. Sarana olahraga, misalnya, tidak hanya meningkatkan prestasi tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan. Begitu pula ruang kreatif yang dapat menjadi wadah inovasi dan pengembangan keterampilan pemuda. Namun, tantangan lain berupa koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk antara pemerintah, komunitas, dan pihak swasta, sering kali menghambat pengelolaan fasilitas secara optimal.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya seperti renovasi fasilitas, pembangunan baru, dan peluncuran program berbasis digital. Meski demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi peran fasilitas infrastruktur terhadap program pembinaan pemuda dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan yang lebih baik, demi mendukung potensi pemuda Kota Bandung secara maksimal.

Identifikasi Masalah

Pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional. Namun, optimalisasi peran ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti lapangan olahraga, ruang pelatihan, dan ruang kreatif. Kota Bandung, yang dikenal dengan dinamika kepemudaan yang tinggi, menghadapi tantangan dalam penyediaan fasilitas yang sesuai kebutuhan pemuda. Ketimpangan antara pusat kota dan wilayah pinggiran menjadi salah satu hambatan utama, mengurangi aksesibilitas dan partisipasi pemuda dalam program pembinaan. Selain itu, meskipun Pemerintah Kota melalui Dispora telah menyediakan sejumlah fasilitas, banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal atau mengalami kerusakan akibat minimnya perawatan.

Pendanaan yang terbatas menjadi faktor lain yang menghambat pengelolaan dan pengembangan fasilitas. Anggaran sering kali tidak mencukupi untuk renovasi atau pembangunan baru, sementara kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas belum berjalan optimal. Koordinasi antarinstansi juga kerap lemah, menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Selain itu, rendahnya partisipasi pemuda sering disebabkan oleh fasilitas yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan mereka, terutama bagi yang bergerak di sektor kreatif dan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi guna meningkatkan pemanfaatan fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda, sehingga potensi mereka sebagai agen pembangunan dapat dioptimalkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk mendukung program pembinaan pemuda?
2. Sejauh mana fasilitas infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan pemuda di Kota Bandung, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun aksesibilitas?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyediakan dan mengelola fasilitas infrastruktur untuk pembinaan pemuda?
4. Bagaimana peran pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, komunitas pemuda, dan pihak swasta, dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas infrastruktur?
5. Apa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung?
6. Bagaimana implementasi regulasi dan kebijakan daerah mendukung program pembinaan pemuda?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung. Secara khusus, tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun aksesibilitas.
2. Mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan pemuda dan ketersediaan fasilitas infrastruktur yang ada.

3. Mengungkap kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyediakan dan mengelola fasilitas infrastruktur.
4. Menjelaskan peran pemangku kepentingan, seperti pemerintah, komunitas pemuda, dan sektor swasta, dalam pengelolaan fasilitas infrastruktur untuk pembinaan pemuda.
5. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas fasilitas infrastruktur dalam mendukung pembinaan pemuda di Kota Bandung.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, bagi berbagai pihak yang terkait dalam pembinaan pemuda dan pengelolaan fasilitas infrastruktur. Manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai peran fasilitas infrastruktur dalam pembinaan pemuda.
2. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu serupa di daerah lain.
3. Mengisi kekosongan literatur tentang hubungan antara penyediaan infrastruktur dan efektivitas program pembinaan pemuda.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan data dan informasi kepada Dispora untuk meningkatkan pengelolaan fasilitas infrastruktur.
2. Menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan pemuda yang lebih efektif.
3. Memberikan rekomendasi kepada komunitas pemuda dan organisasi non-pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas dengan optimal.
4. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, komunitas pemuda, dan sektor swasta dalam pengelolaan fasilitas.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam pembinaan pemuda di Kota Bandung, menjadikannya pusat kreativitas pemuda di Indonesia.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana fasilitas infrastruktur mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung, khususnya yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali berbagai perspektif dari pemangku kepentingan yang terlibat.

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini digunakan untuk:

1. Menggali Pemahaman Mendalam: Mengenai fasilitas seperti Youth Center dan program kewirausahaan (SEMPUR).
2. Mengamati Konteks Sosial: Melihat dinamika interaksi pemerintah, pemuda, dan sektor swasta.
3. Menganalisis Kompleksitas: Mengidentifikasi hambatan seperti pemeliharaan fasilitas dan kolaborasi lintas sektor.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Deskripsi: Menggambarkan kondisi, fungsi, dan pemanfaatan fasilitas kepemudaan.
2. Analisis: Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program pembinaan pemuda menggunakan teori implementasi kebijakan.

c. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian: Fasilitas kepemudaan yang dikelola Dispora Bandung, seperti Youth Center, Laboratorium Kewirausahaan, dan Youth Space. Fenomena yang Dikaji:
2. Fenomena yang Dikaji: Pelaksanaan program seperti SEMPUR yang mendukung kewirausahaan pemuda.

d. Alasan Pemilihan Metode

Metode ini dipilih berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan. Tantangan seperti pemeliharaan fasilitas, partisipasi pemuda, dan kolaborasi lintas sektor menjadikan pendekatan kualitatif relevan untuk mengeksplorasi isu-isu ini secara komprehensif.

e. Tahapan Penelitian

1. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.
2. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik dan komparatif untuk mengidentifikasi pola dan membandingkan temuan dengan teori.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fasilitas yang dikelola Dispora di Kota Bandung, seperti Youth Center di GGM, Laboratorium Kewirausahaan, Pusat Kreativitas Pemuda, dan Youth Space di 30 kecamatan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi pejabat Dispora, pengelola fasilitas, peserta program SEMPUR, serta mitra sektor swasta. Pemilihan subjek didasarkan pada peran mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi fasilitas serta program kepemudaan.

Kriteria Pemilihan Subjek

Subjek dipilih berdasarkan kriteria berikut:

1. Peran dalam Kebijakan dan Program: Mereka yang terlibat langsung dalam perencanaan atau implementasi kebijakan kepemudaan di Kota Bandung.
2. Pengalaman dan Kontribusi: Pemuda atau komunitas yang telah berpartisipasi aktif dalam program pembinaan atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan.
3. Keberagaman Perspektif: Subjek dari berbagai latar belakang (pemerintah, swasta, dan komunitas) untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh.

Melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan subjek-subjek ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana fasilitas infrastruktur mendukung pembinaan pemuda dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program kepemudaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder berupa dokumen kebijakan dan laporan Dispora juga dianalisis:

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui beberapa metode:

- a. Wawancara Mendalam
 - Dilakukan secara semi-terstruktur dengan:
 - Pejabat Dispora: Memahami kebijakan dan strategi pengelolaan fasilitas.
 - Pengelola fasilitas kepemudaan: Informasi tentang operasional, tantangan, dan pemanfaatan fasilitas.
 - Pemuda peserta program: Persepsi dan pengalaman terkait dampak pembinaan.
 - Pihak swasta: Pandangan tentang kolaborasi dalam mendukung fasilitas kepemudaan.
- b. Observasi Lapangan
 - Meninjau kondisi fisik fasilitas (sarana dan prasarana).
 - Mencatat jenis kegiatan dan tingkat partisipasi pemuda.
 - Mengamati interaksi antara pengelola, pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)
 - Melibatkan pemuda, pengelola fasilitas, dan komunitas terkait.
 - Mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan tantangan dalam pembinaan.
 - Memvalidasi hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks tambahan terhadap data primer. Sumber data sekunder meliputi:

- a. Studi Dokumen

Dokumen-dokumen yang akan dianalisis antara lain:

- Laporan Resmi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung: Berisi data statistik, program, dan evaluasi terkait fasilitas kepemudaan.
- Regulasi dan Kebijakan Lokal: Misalnya, peraturan daerah yang mengatur pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepemudaan.
- Data Statistik Pemuda: Meliputi informasi demografi, tingkat partisipasi dalam program kepemudaan, dan indikator keberhasilan program

b. Literatur Terkait

Penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, dan artikel tentang implementasi kebijakan otonomi daerah, pembangunan pemuda, dan pengelolaan infrastruktur kepemudaan. Literatur ini digunakan untuk memberikan kerangka teoritis dan membandingkan hasil penelitian dengan temuan sebelumnya.

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data wawancara, observasi, dan dokumen untuk meningkatkan keabsahan hasil dan mengurangi bias.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang mendukung analisis mengenai peran fasilitas infrastruktur dalam pembinaan pemuda di Kota Bandung. Instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara, checklist observasi, dan kerangka analisis dokumen.

Panduan wawancara berisi pertanyaan untuk menggali isu terkait kebijakan dan pemanfaatan fasilitas. Wawancara dilakukan dengan pejabat Dispora, pengelola fasilitas, pemuda dalam program SEMPUR, dan pihak swasta. Checklist observasi memandu pengamatan terhadap kondisi fisik fasilitas, penggunaan, dan interaksi antar pemangku kepentingan. Kerangka analisis dokumen digunakan untuk menganalisis laporan dan kebijakan terkait, serta data statistik pemuda dan pemanfaatan fasilitas.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dan analisis komparatif. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang terkumpul.

a. Analisis Tematik

- Transkripsi Data: Wawancara ditranskrip secara verbatim.
- Koding Data: Memberikan kode pada bagian penting dalam transkrip dan observasi.
- Identifikasi Tema: Mengelompokkan kode-kode ke dalam tema relevan, seperti "hambatan pemeliharaan fasilitas" dan "kolaborasi lintas sektor".
- Interpretasi Tema: Menganalisis tema untuk menjelaskan dinamika kebijakan dan dampaknya terhadap pembinaan pemuda.

b. Analisis Komparatif

Teknik ini membandingkan data dari berbagai sumber untuk memperkuat validitas temuan. Langkah-langkahnya adalah:

- Perbandingan Antar Sumber Data: Membandingkan perspektif pejabat dinas dan pengelola fasilitas.
- Perbandingan dengan Kerangka Teori: Menggunakan teori implementasi kebijakan untuk menganalisis temuan.
- Perbandingan dengan Studi Sebelumnya: Membandingkan hasil penelitian dengan studi sebelumnya..

c. Triangulasi Data

Untuk meningkatkan keabsahan hasil, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Metode ini membantu mengkonfirmasi temuan dan mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kebijakan Pemuda dan Olahraga di Kota Bandung

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung bertugas mengelola program kepemudaan dan olahraga melalui struktur organisasi yang terbagi dalam empat bidang utama. Pembagian ini dirancang untuk menangani kebutuhan masyarakat secara profesional, baik

dalam pengembangan olahraga maupun pemberdayaan pemuda. Salah satu program unggulan Dispora adalah SEMPUR (Sentra Pemuda Mandiri dan Unggul), yang berfokus pada pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Program ini mencakup pemetaan potensi, pembangunan karakter, hingga pelatihan dan asistensi usaha, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemuda sebagai pelaku ekonomi produktif. Fasilitas seperti Youth Center, Youth Space, dan Pusat Kreativitas Pemuda menjadi penunjang penting keberhasilan program Dispora. Fasilitas ini dibangun di lokasi strategis untuk mendukung kegiatan seni, olahraga, dan pengembangan komunitas pemuda, termasuk Gelanggang Generasi Muda (GGM) yang dilengkapi sarana olahraga dan ruang multifungsi. Namun, Dispora masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses, promosi yang minim, dan pengelolaan yang belum optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam program seperti SEMPUR memberikan hasil positif, tetapi membutuhkan pengawasan dan dukungan lebih lanjut untuk menciptakan dampak yang lebih signifikan.

Implementasi Otonomi di Bidang Pemuda dan Olahraga

Otonomi daerah di Kota Bandung memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengelola program pemuda dan olahraga sesuai kebutuhan lokal. Dispora memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pemuda melalui program seperti Youth Space, yang tersebar di 30 kecamatan untuk mendekatkan akses kegiatan kepada pemuda. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, seni, dan pengembangan komunitas. Selain itu, program SEMPUR memberikan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan hingga tahap eksperimen usaha.

Implementasi kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dukungan perusahaan lokal dalam pembinaan kewirausahaan menjadi langkah strategis, meskipun masih ada tantangan seperti perbedaan prioritas kebijakan antarlevel pemerintahan dan keterbatasan SDM pelaksana. Peningkatan penguasaan teknologi dan manajemen berbasis data diperlukan untuk mendukung pengelolaan fasilitas dan program secara lebih efektif.

Analisis Birokrasi Pemerintahan Daerah

Birokrasi di Kota Bandung menghadapi sejumlah kendala dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Masalah utama adalah kurangnya sinkronisasi antarinstansi yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan pelaksanaan program. Menurut Josef Kaho, reformasi manajemen birokrasi menjadi solusi penting untuk menciptakan struktur yang lebih efisien dan adaptif.

Reformasi ini mencakup penerapan teknologi digital, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam konteks ini, interoperabilitas antarinstansi menjadi kunci untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, adaptabilitas birokrasi diperlukan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang dinamis. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta dan komunitas lokal, dapat membantu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan reformasi yang tepat, birokrasi Kota Bandung diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan secara lebih responsif dan inovatif.

Hambatan dan Kendala

Implementasi kebijakan kepemudaan di Kota Bandung menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang lemah. Anggaran yang minim sering kali tidak cukup untuk mendukung program secara menyeluruh, sementara kemitraan dengan sektor swasta belum konsisten. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan fasilitas menyebabkan kerusakan yang lambat diperbaiki akibat prosedur birokrasi yang panjang.

Aksesibilitas fasilitas juga menjadi tantangan, terutama di daerah pinggiran yang kurang strategis. Sosialisasi program yang minim, seperti SEMPUR, membuat banyak pemuda tidak mengetahui peluang yang tersedia. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, hambatan ini menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya yang lebih baik, koordinasi lintas sektor, dan komunikasi program yang efektif. Langkah strategis seperti optimalisasi anggaran, peningkatan koordinasi, dan desentralisasi pengelolaan fasilitas dapat

memperkuat dampak program pembinaan pemuda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung.

Peran dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung memiliki peran kunci dalam mendukung pembinaan pemuda melalui berbagai program berbasis fasilitas infrastruktur, seperti Youth Center, Youth Space, dan laboratorium kewirausahaan. Namun, keberhasilan program-program ini tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah daerah, tetapi juga pada kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Dispora melibatkan komunitas pemuda melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) untuk memastikan program dan fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pemuda di lapangan. Sektor swasta turut berkontribusi, terutama melalui program SEMPUR yang menyediakan pelatihan kewirausahaan dan mentor, sekaligus membantu mengurangi beban pemerintah daerah.

Meskipun kolaborasi berjalan baik, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar-mitra, proses administrasi birokratis yang rumit, dan kurangnya strategi komunikasi yang efektif masih menjadi hambatan. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan strategi komunikasi yang lebih baik sangat diperlukan agar pemanfaatan fasilitas dan partisipasi masyarakat dapat lebih optimal. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas, program pembinaan pemuda di Kota Bandung memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, menciptakan generasi muda yang unggul, mandiri, dan siap bersaing di tingkat global.

Analisis Temuan dengan Kerangka Teori

Analisis dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya strategi komunikasi menyebabkan rendahnya partisipasi pemuda dalam program-program seperti Youth Space dan SEMPUR. Edward III menekankan pentingnya transmisi informasi yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, Dispora perlu mengoptimalkan media digital, kampanye publik, dan kolaborasi dengan komunitas untuk menyebarkan informasi terkait program.

Selanjutnya, sumber daya menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang belum memadai, terutama dalam hal teknologi dan manajemen, menjadi hambatan utama. Edward III menyarankan perlunya sumber daya yang memadai, baik finansial maupun non-finansial, untuk mendukung kebijakan yang sukses. Dispora perlu memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan meningkatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Faktor disposisi dan struktur birokrasi juga berperan dalam implementasi. Disposisi pegawai yang bersemangat perlu diselaraskan dengan prioritas instansi lain, sementara reformasi birokrasi diperlukan untuk mempermudah prosedur dan meningkatkan efisiensi, dengan memanfaatkan sistem digitalisasi untuk mempercepat administrasi.

Analisis Keseluruhan

Implementasi kebijakan kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung telah mencapai beberapa hasil positif, seperti pembangunan infrastruktur **Youth Space** dan pelaksanaan program inovatif seperti **SEMPUR**. Namun, tantangan dalam komunikasi, sumber daya, koordinasi, dan birokrasi menghambat optimalisasi dampaknya. Dengan langkah strategis yang mencakup peningkatan komunikasi, alokasi sumber daya yang memadai, penyelarasan disposisi antarinstansi, serta reformasi birokrasi, kebijakan kepemudaan di Kota Bandung dapat lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas infrastruktur seperti **Youth Space**, **Youth Center**, dan laboratorium kewirausahaan yang disediakan oleh Dispora Kota Bandung berperan penting dalam mendukung pembinaan pemuda. Namun, optimalisasinya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, distribusi fasilitas yang tidak merata, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi antarinstansi yang kurang efektif. Prosedur administrasi yang kompleks juga menghambat pengelolaan fasilitas. Meski begitu, program seperti **SEMPUR** membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas pemuda, dan sektor swasta dapat memberikan

dampak positif signifikan. Dengan mengatasi hambatan ini, fasilitas infrastruktur dapat lebih efektif dalam memberdayakan pemuda sebagai agen pembangunan yang inovatif dan mandiri.

Saran

Untuk mengoptimalkan peran fasilitas infrastruktur, disarankan peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan fasilitas baru di wilayah yang membutuhkan, serta pengelolaan dana yang transparan. Pemerataan distribusi fasilitas harus dilakukan melalui evaluasi kebutuhan lokal dan peningkatan aksesibilitas di daerah pinggiran. Dispora juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, membentuk tim lintas sektor, dan melatih sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi serta komunikasi yang efektif. Kolaborasi dengan sektor swasta harus diperluas untuk mendukung program kewirausahaan melalui pendanaan, pelatihan, dan magang. Terakhir, strategi komunikasi yang lebih baik melalui media sosial, aplikasi teknologi, dan kampanye edukatif harus diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemanfaatan fasilitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran pemuda dalam pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. (2023). Laporan tahunan 2023.
- Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. (2023). Evaluasi program Dispora Kota Bandung.
- Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. (2024). Data fasilitas kepemudaan di Kota Bandung.
- Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. (2024). Data evaluasi program SEMPUR.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Prasetyo, G. (2024, November 27). Wawancara dengan Kepala Bidang PIK Dispora Kota Bandung.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2020). RPJMN 2020–2024: Bab 4 tentang pembangunan SDM.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Sage Publications.
- Wibowo, A. (2021). Implementasi kebijakan publik di pemerintahan lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 45–56.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Kaho, J. R. (1988). *Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pemerintah Kota Bandung. (2015). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepemudaan. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.